



Determinan Pengelolaan Keuangan Daerah : Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi

Aina Thusamma Salsabila¹, Dwi Suhartini²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran/Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur/Indonesia

Email: ainasalsabila71@gmail.com¹, dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id²

Citation: Salsabila, A. T., & Suhartini, D. (2023). Determinan Pengelolaan Keuangan Daerah : Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 264–271. DOI: [10.32662/gaj.v6i2.3150](https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3150)

Artikel info

Artikel history:

Received: 19-07-2023

Revised: 02-09-2023

Accepted: 11-10-2023

Abstract. *This research aims to analyze the responses of government officials in villages or urban districts regarding transparency in local financial management moderated by the internal control system. The study was conducted in villages and urban districts in the Sidoarjo District, with a sample of 42 respondents, including Village/Urban District Heads, Village/Urban District Secretaries, and Treasurers from each village and urban district. This research is quantitative in nature, and the analysis technique used is Partial Least Square (PLS) with the assistance of WarpPLS 8.0 software. The findings indicate that transparency has a positive impact on local financial management. However, the internal control system cannot strengthen the relationship between transparency and local financial management.*

Abstrak. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis respons aparaturnya pemerintah desa atau kelurahan mengenai transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal. Penelitian ini dilakukan di desa dan kelurahan di Kecamatan Sidoarjo, dengan unit analisis yaitu 42 responden yang terdiri dari Kepala Kelurahan/Desa, Sekretaris Kelurahan/Desa, dan Bendahara dari masing-masing kelurahan dan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisisnya menggunakan Partial Least Square (PLS) yang memanfaatkan software WarpPLS 8.0. Diketahui bahwa hasil dari penelitian yaitu Transparansi berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun, sistem pengendalian internal tidak dapat menjadi alat yang memperkuat hubungan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Keywords:

Transparansi;
Pengelolaan
Keuangan
Daerah; Sistem
Pengendalian
Internal

Corresponden author:

Email: dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id

Pendahuluan

Konsekuensi dari adanya kebijakan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu diterapkannya Desentralisasi. Tujuan dari desentralisasi ini yaitu adanya pemerataan pelayanan oleh pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat, yang artinya bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengurus masing-masing wilayahnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini diwujudkan dengan adanya bentuk rencana kerja pemerintah daerah, yaitu di tingkat kelurahan dan desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan hingga pengawasan (Mada dkk., 2017). Pernyataan dikemukakan oleh Djmiraga & Widajantie (2022), bahwa good governance perlu dilakukan di tingkat kelurahan atau desa sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan agar dapat terhindar dari penyelewengan. Terdapat beberapa prinsip dalam penerapan good governance, dimana akuntabilitas dan transparansi termasuk ke dalam prinsipnya. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang menjadikan masyarakat mengetahui informasi seputar kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Oleh karena itu, kelurahan dan desa perlu melakukan pengelolaan keuangan dengan mewujudkan prinsip transparansi tersebut agar terhindar dari berbagai bentuk penyelewengan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat semakin bertambah dari tahun ke tahun. Disebutkan dalam kemenkopmk.go.id bahwa Kemenkeu menyalurkan dana kepada desa sebesar Rp. 72 Triliun di tahun 2020 dan 2021. Dan di tahun berikutnya, sampai dengan bulan Oktober, dana desa telah disalurkan sebesar Rp 55,4 Triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,3% dari tahun 2021 di periode yang sama. Dengan jumlah yang semakin meningkat ini, diperlukan pengelolaan yang akuntabel dan transparan agar tujuan dari pengalokasian anggaran ini, yaitu pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai. Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan yang terjadi bahkan di tingkat kelurahan atau desa. Seperti kasus penyelewengan yang terjadi di Kecamatan Sidoarjo, dimana menurut berita yang ditulis oleh Apriliani (2022), di kecamatan Sidoarjo sendiri, terdapat kasus penyalahgunaan wewenang, dimana terdapat 3 kepala desa yang korupsi di tahun 2022. Tentu saja kasus seperti ini meresahkan masyarakat, karena Kecamatan Sidoarjo sendiri merupakan kecamatan yang mendapatkan anggaran terbesar di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar Rp. 34 Miliar di tahun 2022.

Hasil studi empiris sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi. Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiati dkk., (2020) dan Setianingsih dkk., (2022) bahwa akuntabilitas dan transparansi menghasilkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Namun, hasil studi empiris sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Maryono (2022), hasilnya transparansi menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Dalam upaya pencegahan kasus penyelewengan pengelolaan keuangan di kelurahan atau desa, dibutuhkan suatu pengendalian. Menurut Budiati dkk., (2020), dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal merupakan syarat wajib yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan yang bersih. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan good governance dapat dilakukan dengan baik apabila sistem pengendalian internal juga diterapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiati dkk., (2020), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap

kinerja pengelolaan dana desa. Adanya kasus penyelewengan yang terjadi membuat penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh lagi mengenai faktor memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparansi yang dimoderasi sistem pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor transparansi berpengaruh pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kuantitatif dengan objek penelitiannya meliputi transparansi, pengelolaan keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Kelurahan dan Desa di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Jumlah populasi yang dipilih yaitu 14 Kelurahan dan 10 Desa se-Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dengan unit analisis yaitu responden yang terdiri dari Kepala Kelurahan/Desa, Sekretaris Kelurahan/Desa, dan Bendahara. Penelitian ini menggunakan simple random sampling sebagai penentuan sampel. Menurut perhitungan Rumus Slovin, dihasilkan didapatkan 42 responden sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan oleh penulis secara langsung dengan sumber data yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Analisis data pada studi ini menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan memanfaatkan WarpPLS 8.0 dalam melakukan analisis data karena dalam teknik analisis ini, variabel dapat diukur dengan indikatornya sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih jelas dan rinci.

Hasil Dan Pembahasan

Convergent Validity

Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai *loading factor*. Menurut Ghazali (2021:74) nilai *loading factor* sebesar 0,50-0,60 dapat dikatakan memadai untuk penelitian tahap awal.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Nilai Outer Loading

Variabel	Indikator	Nilai Outer Loading		Keterangan
		Awal	Modif	
Transparansi (X1)	X1.1	0.847	0.842	VALID
	X1.2	0.782	0.814	VALID
	X1.3	0.882	0.892	VALID
	X1.4	0.865	0.880	VALID
	X1.5	-0.669	DROP	DROP
Sistem Pengendalian Internal (M)	M1.1	0.620	0.620	VALID
	M1.2	0.751	0.751	VALID
	M1.3	0.824	0.824	VALID
	M1.4	0.837	0.837	VALID
	M1.5	0.882	0.882	VALID
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Y1.1	0.841	0.841	VALID
	Y1.2	0.651	0.651	VALID
	Y1.3	0.548	0.548	VALID
	Y1.4	0.709	0.709	VALID
	Y1.5	0.773	0.773	VALID

Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023

Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa pada Tabel 1 nilai *outer loading* dari hampir semua proksi lebih besar dari 0.5, sehingga penelitian ini dapat dikatakan layak untuk dijadikan indikator yang dapat mencerminkan masing-masing variabel.

Discriminant Validity

Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan *cross loading*. Dikatakan memenuhi pengujian ini apabila nilai *cross loading* suatu variabel yang lebih tinggi dari variabel lain. Hasil pengujian *discriminant validity* ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Nilai Cross Loading

IND	TRN(X1)	SPI(M)	PKD(Y)	SPI(M)* TRN(X1)	Keterangan
X1.1	0.842	-0.169	0.173	0.352	VALID
X1.2	0.814	-0.462	0.381	-0.357	VALID
X1.3	0.892	0.225	-0.419	-0.069	VALID
X1.4	0.880	0.361	-0.093	0.063	VALID
M1.1	-0.460	0.620	0.450	0.076	VALID
M1.2	-0.381	0.751	0.071	0.545	VALID
M1.3	0.531	0.824	-0.180	-0.451	VALID
M1.4	0.180	0.837	0.030	-0.186	VALID
M1.5	-0.019	0.882	-0.237	0.080	VALID
Y1.1	-0.220	-0.301	0.841	-0.074	VALID
Y1.2	-0.408	-0.001	0.651	0.172	VALID
Y1.3	0.334	0.193	0.548	0.365	VALID
Y1.4	0.437	0.090	0.709	-0.128	VALID
Y1.5	-0.055	0.109	0.773	-0.205	VALID
SPI(M)* TRN(X1)	0	0	0	1	VALID

Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa *cross loading* indikator variabel satu dengan indikator variabel lain lebih besar, sehingga penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi pengujian *discriminant validity*.

Uji Reliabilitas

Dalam *outer loading*, pengujian reliabilitas memperhatikan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Agar dianggap reliabel, *composite reliability* dan *cronbach alpha* harus lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian ini ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Nilai Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha
Transparansi (X1)	0.917	0.879
Sistem Pengendalian Internal (M)	0.890	0.843
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.834	0.749

Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023

Berdasarkan Tabel 3, diketahui nilainya telah diatas 0.70. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini reliabel.

Model Struktural (Inner Model)

Model struktural memperhatikan nilai Koefisien Determinasi (R^2), yaitu sebesar 0.75 atau substansial; 0,50 atau moderat; dan 0,25 atau lemah dari setiap variabel. Hasil pengujian R-square diperlihatkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Nilai R-square

<i>R-square</i>	
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.308

Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023

Diketahui bahwa dari hasil tersebut, maka transparansi, serta hubungan yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dalam model struktural memiliki nilai R-square sebesar 0.308 atau moderat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kecocokan model yang dapat dijelaskan oleh hubungan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 30,8%, dan 69,2% sisanya tidak dijelaskan di dalam model ini.

Model struktural juga memperhatikan nilai *Predictive Relevance* (Q^2). Nilai Q-square sebesar 0.25 atau lebih memiliki nilai relevansi prediktif yang kuat. Hasil pengujian Q-Square ditunjukkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Q-square

<i>Q-square</i>	
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.435

Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023

Berdasarkan hasil analisis Q-square dapat diartikan bahwa nilai *predictive relevance* penelitian ini sebesar 0.435. Artinya model struktural dalam penelitian ini menghasilkan nilai hubungan setiap variabel senilai $0.435 > 0.25$, yang dimana memperlihatkan bahwa model tersebut bernilai predictive relevance yang kuat.

Pengujian Hipotesis

Uji Fit Model

Tabel 6 Nilai Fit Model dan Quality Indices

Indikator	Indeks	P-Value	Hasil
Fit Model			
APC	0.343	0.004	Diterima
ARS	0.308	0.007	Diterima
AVIF	2.542	-	Diterima

Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023

Berdasarkan Tabel 6 nilai P-value sebesar <0.05 sehingga dinilai signifikan dan untuk AVIF adalah <5 . Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam pengujian ini sehingga memenuhi syarat fit model.

Uji Hipotesis

Tabel 7 Nilai Uji Hipotesis

Variabel	B	P-Value	Hasil
X1 → Y	0.277	0.025	DITERIMA
M*X1 → Y	-0.082	0.293	DITOLAK

Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis yang ada pada tabel 7 dapat diartikan sebagai berikut:

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Diketahui bahwa hasil koefisien pengujian yang dilakukan untuk variabel Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar β 0.277 dengan p-value 0.025. Berdasarkan uji hipotesis, diketahui bahwa H1 diterima karena p-value $0.025 < 0.05$, sehingga Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa semakin transparan kinerja yang diterapkan di kelurahan dan desa se-Kecamatan Sidoarjo, maka semakin optimal pengelolaan keuangannya. Hal ini didukung oleh Budiati dkk., (2020), Indriasih dkk., (2022), dan Kusrawan dkk., (2022) yang mengeluarkan pernyataan bahwa pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh transparansi secara signifikan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal

Diketahui bahwa hasil koefisien pengujian yang dilakukan untuk variabel Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal sebesar β -0.082 dengan p-value 0.293. Hal ini dapat diketahui bahwa H2 ditolak karena p-value $0.293 > 0.05$, sehingga Sistem Pengendalian Internal tidak dapat menjadi pemoderasi hubungan antara Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Kelurahan dan desa se-Kecamatan Sidoarjo telah menerapkan sistem pengendalian internal, tetapi masih memerlukan pembenahan dalam pengidentifikasian resiko yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Hal ini yang menyebabkan sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal yang gagal memoderasi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiati dkk., (2020) serta Hidayati & Dianawati (2017) yang menyatakan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal bukan jaminan kesuksesan pengelolaan keuangan.

Kesimpulan Dan Saran

Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan pengujian pada penelitian ini adalah transparansi berdampak baik terhadap pengelolaan keuangan daerah, tetapi sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi hubungan antara transparansi terhadap pengelolaan keuangan. Keterbatasan penelitian ini yaitu adanya faktor diluar penelitian ini yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah, sehingga saran yang dapat diberikan yaitu adanya penambahan variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan mensosialisasikan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang dilandasi oleh transparansi dan sistem pengendalian internal.

Daftar Pustaka

- Apriliani, M. (2022): Tahun Ini Tiga Kades dan Satu Mantan Kades di Sidoarjo Jadi Tersangka, diperoleh melalui situs internet: <https://www.jawapos.com/surabaya/20/08/2022/tahun-ini-tiga-kades-dan-satu-mantan-kades-di-sidoarjojadi-tersangka/>.
- Asmoro, W. K., dan Setianingsih, N. A. (2019): Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri, *Owner*, 3(2), 270. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>
- Bay, P. G., dan Tunti, M. E. D. (2019): Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang), *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(2), 138–147.
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., dan Niati, A. (2020): Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal, *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- Djamiraga, A. C., dan Widajantie, T. D. (2022): Pengaruh kompetensi dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 4806–4814. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1779>
- Fajri, R., Agusti, R., dan Julita (2021): Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, 17(2), 209–227.
- Hidayati, N., dan Dianawati, W. (2017): Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Pada Pengaruh Antara Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial, *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 54–72. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.5344>
- Indika, M. (2021): Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 167–187. <https://doi.org/10.25170/jak.v14i2.1116>
- Indriasih, D., Fajri, A., dan Febriana, D. (2022): Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 972–981. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>
- Kharisma, B. (2013): Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Kusrawan, K., Liswatin, L., dan Haris, T. S. (2022): Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Barowila, *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2767–2773. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.780>
- Mada, S., Kalangi, L., dan Gamaliel, H. (2017): Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Nababan, R. A., Sihombing, M., dan Thamrin, H. (2018): Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money

- pada Pemerintah di Kabupaten Dairi, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 108.
<https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157>
- Ngakil, I., dan Kaukab, M. E. (2020): Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo, *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., dan Puspitasari, N. (2016): Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah, *Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen*, 10(1), 68–81.
- Putri, A. R. L., dan Maryono (2022): Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- Setianingsih, N. A., Asmoro, W. K., dan Putranti, E. (2022): Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat, *Owner*, 6(4), 3860–3869.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127>